



**LAPORAN KINERJA TAHUN 2021**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG**  
**KELAUTAN, PERIKANAN DAN**  
**KEHUTANAN**

**DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN**  
**DAN INVESTASI**  
**SEKRETARIAT KABINET**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2021 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan dengan tujuan mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai kewajiban mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. IKU sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa indikator kegiatan. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2022

Asisten Deputi Bidang Kelautan,  
Perikanan, dan Kehutanan,



Diana Irawati, S.H., LL.M.

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2021 disusun untuk memotret capaian kinerja unit kerja di tingkat Eselon II dengan mengukur perbandingan antara target pada Penetapan Kinerja dengan capaian realisasinya mengacu pada sasaran strategis sebagaimana ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan indikator kinerja “disetujui Sekretaris Kabinet” dengan target 91%. Secara umum, kinerja yang diukur khususnya terkait rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk dukungan bahan pertemuan Presiden dan/atau Wakil Presiden), persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangan-undangan (termasuk rancangan peraturan menteri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden), alternatif penyelesaian masalah (debottlenecking) pelaksanaan kebijakan/program pemerintah dan hasil monitoring evaluasi.

Dari 119 output yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan selama tahun 2021, sebanyak 35 rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet, untuk selanjutnya diterima oleh Presiden, ataupun untuk disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait. Capaian realisasi kinerja pada periode ini pada range 92,31%-100%.

Pada sepanjang tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp496.430.221 dari total pagu setelah revisi berjumlah Rp506.232.000 atau terealisasi sebesar 98,06%.

Terdapat beberapa tantangan ataupun kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis di Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan di tahun 2021 ini, tantangan terbesar tentunya kondisi Pandemi Covid-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan serta perubahan kondisi kerja dengan sistem Work from Home (WFH). Kendala lainnya yang dihadapi antaranya keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya dalam hal basis data. Untuk menghadapi tantangan/kendala dimaksud, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan telah berupaya untuk mengatasinya diantaranya dengan meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan proaktif dengan para pemangku kepentingan dan mengoordinasikan keterbatasan sumber daya manusia dengan unit kerja terkait.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

	<b>hal</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	<b>1</b>
B. Gambaran Organisasi .....	<b>2</b>
C. Gambaran Aspek Strategis .....	<b>4</b>
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Gambaran Umum .....	<b>7</b>
B. Rencana Strategis Tahun 2015-2019.....	<b>7</b>
C. Perjanjian Kinerja (PK) .....	<b>9</b>
D. Ikhtisar IKU .....	<b>11</b>
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Indikator Kinerja.....	<b>15</b>
B. Akuntabilitas Keuangan.....	<b>25</b>
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja.....	<b>27</b>
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	<b>30</b>
B. Rekomendasi.....	<b>30</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan	4
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	8
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	9
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 3.1	Kategori Pencapaian Kinerja	14
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Asdep KPH Triwulan 4 Tahun 2020 dan Tahun 2021	15
Tabel 3.3	Pemanfaatan Output Asdep KPH 2021	16
Tabel 3.4	Capaian Outcome 2021	16
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Sasaran 1 Indikator 1	17
Tabel 3.6	Contoh Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	17
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Sasaran 1 Indikator 2	20
Tabel 3.8	Contoh Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapat Persetujuan Presiden di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	21
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Sasaran 2 Indikator 1	22
Tabel 3.10	Contoh Rekomendasi Alternatif Penyelesaian Masalah atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	22
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Sasaran 2 Indikator 2	24

Tabel 3.12	Contoh Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	24
Tabel 3.13	Akuntabilitas Keuangan	26

# DAFTAR BAGAN/GRAFIK

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	3
Grafik 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	26

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisa Swot Asdep Kelautan, Perikanan, Dan Kehutanan	5
Gambar 1.2	<i>Dashboard</i> Sistem Informasi Kinerja Terpadu Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, Dan Kehutanan	6
Gambar 2.1	Visi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	8
Gambar 2.2	Misi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	8
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja 2021	10
Gambar 3.1	<i>Dashboard</i> Sistem Informasi Kinerja Terpadu dan Capaian Kinerja 2021	17

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Asdep KPH Tahun 2021
Lampiran 2	Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2021
Lampiran 3	Matriks Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2021
Lampiran 4	Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Asdep KPH) Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021. LKj disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya), dengan cara membandingkan rencana dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan capaian target sasaran pada akhir tahun 2021.

## **B. GAMBARAN ORGANISASI ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2021**

Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep KPH merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, merujuk pada pembentukan Kabinet Indonesia Maju berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dimana Kementerian Koordinator Kemaritman berubah nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dengan penambahan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam koordinasinya.

Asdep KPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Asdep KPH menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Laporan akuntabilitas kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sehingga dapat menggambarkan pencapaian Asdep KPH selama tahun 2021 melalui perbandingan capaian kinerja (*performance results*) dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sebagai alat ukur keberhasilan tahunan unit kerja dan memungkinkan untuk dilakukan identifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

### **1. Struktur Organisasi**

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asdep KPH didukung oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu: Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Perikanan dan Bidang Kehutanan.

#### **1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari:**

(1) Subbidang Tata Ruang Laut; dan

- (2) Subbidang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 2) **Bidang Perikanan**, terdiri dari:
  - (1) Subbidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; dan
  - (2) Subbidang Industri dan Sumber Daya Perikanan.
- 3) **Bidang Kehutanan**, terdiri dari:
  - (1) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
  - (2) Subbidang Pengelolaan Kawasan Hutan.
- 4) **Kelompok Jabatan Fungsional**

**Bagan 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**



**2. Kepegawaian**

Jumlah pegawai Asdep KPH adalah 14 orang dan dibantu 1 orang pegawai tidak tetap. Pejabat/pegawai Asdep KPH terdiri dari 7 orang pejabat struktural (1 orang pejabat Eselon II, 3 orang pejabat Eselon III, dan 3 orang pejabat Eselon IV), dan staf analis sebanyak 7 orang. Sumber Daya Manusia Asdep KPH dilihat dari latar belakang Pendidikan berasal dari berbagai disiplin ilmu sesuai kualifikasi kebutuhan pejabat/pegawai, yaitu 4 orang Sarjana S2, 5 orang Sarjana Hukum, 4 orang Sarjana Ekonomi, dan 1 orang Sarjana Perikanan.

Formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asdep KPH menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai**  
**Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Jenjang	Jumlah	L/P	Jumlah
IV/d	1	Eselon II	1	S2	1	Perempuan	1
IV/b	1	Eselon III	3	S1	1	Laki-Laki	1
IV/a	2			S2	2	Perempuan	2
III/d	1	Eselon IV	3	S2	1	Perempuan	2
III/c	2			S1	2	Laki-Laki	1
III/a	7	Staf Analis	7	S1	7	Laki-Laki	2
						Perempuan	5

### C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

**Visi Presiden Joko Widodo** sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mendukung terwujudnya visi Presiden tersebut, kedudukan Asdep KPH sebagai salah satu unit kerja di Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan strategis membantu Deputi dalam menjalankan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan visi Presiden dimaksud, khususnya di sektor kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan peran tersebut, Asdep KPH berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Asdep KPH juga berperan dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden. Selain itu, Asdep KPH menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi.

Berikut Analisa SWOT Asdep KPH:

**Gambar 1.1**  
**ANALISA SWOT ASDEP KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**



Tantangan utama yang dihadapi Asdep KPH dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, adalah kendala dalam mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan, yang tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil laporan.

Sekretariat Kabinet telah membangun sistem aplikasi untuk monitoring kinerja pejabat mulai dari level Eselon 2 hingga Eselon 4 dengan target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Pengisian hasil kinerja dilakukan per triwulanan melalui

Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) pada laman intranet //sikt.intranet. Terlampir *dashboard* Asdep Kelautan dan Perikanan pada sistem SIKT.

**Gambar 1.2**  
***Dashboard* Sistem Informasi Kinerja Terpadu**  
**Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, Dan Kehutanan**

04 Januari 2021 - Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan  
 Diana Irawati, S.H., LL.M.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet				
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet				
Terwujudnya hasil pengendalian penyeleksi pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet				
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet				

## **BAB 2**

# **PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Terwujudnya tujuan organisasi didasari adanya manajemen kinerja yang baik. Manajemen kinerja merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi tepat sasaran, mulai dari perencanaan kinerja, monitoring kinerja, penilaian dan evaluasi kinerja.

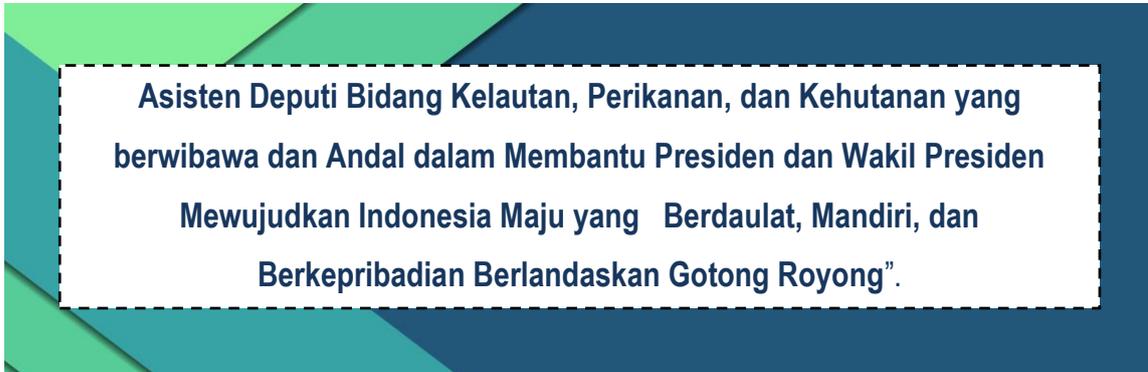
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja Asdep KPH 2021 mengacu pada rencana strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan rencana strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

### **B. RENCANA STRATEGIS**

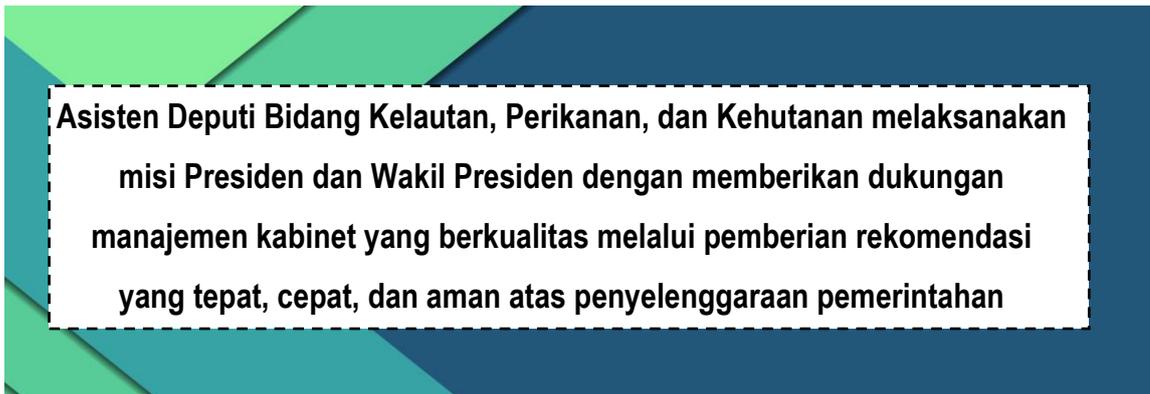
Penyusunan rencana strategis Asdep KPH 2020-2024 berpedoman pada Visi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi “untuk menjadi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berpedoman pada visi-misi Sekretariat Kabinet serta menyesuaikan dengan visi-misi Presiden yang dijabarkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Dalam rangka mendukung visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, dukungan pengelolaan manajemen kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Asdep KPH telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan Asdep KPH yang tertuang dalam rencana strategis Asdep KPH:

**Gambar 2.1**  
**Visi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan**



**Gambar 2.2**  
**Misi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan**



*Tepat* artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.

*Cepat* artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

*Aman* artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, ndic, dan akademik.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Peningkatan kualitas rekomendasi pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	Persentase rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil pengendalian pemerintahan di bidang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
	bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	kelautan, perikanan, dan kehutanan

**Tabel 2.2**

**Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan**

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<p>a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<p>a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>

### C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi dan unit-unit dibawahnya melalui berbagai kegiatan tahunan, melalui penetapan rencana capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Hal tersebut akan menjadi tolok ukur dalam pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/satuan kerja pada akhir tahun.

Rencana kinerja diajukan kepada para pemberi amanat untuk selanjutnya para pihak tersebut mengikat suatu kesepakatan terhadap rencana kinerja yang telah disusun dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). PK Tahun 2021 merupakan pelaksanaan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2021.

Pada PK Asdep KPH, pengukuran kinerja Asdep KPH dicapai melalui 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.3

**Gambar 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan		Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi		
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan		Rp544.029.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi		
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan		Rp255.971.000,-
Total Anggaran		Rp800.000.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021  
 Pihak Pertama,  
 Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan  
 Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.      Diana Irawati, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021  
 Pihak Kedua,  
 Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi      Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan  
 Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.      Diana Irawati, S.H., LL.M.

Adapun pagu awal Asdep KPH untuk mencapai kedua sasaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 800.000.000. Dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengubah politik anggaran kementerian/lembaga, anggaran unit kerja mengalami pemotongan hingga pagu revisi menjadi sebesar Rp 506.232.000. Per 31 Desember 2021, realisasi anggaran mencapai Rp 496.430.221 (98,06%).

Pencapaian sasaran strategis dengan pagu total sebesar Rp 506.232.000 dan terealisasi per 31 Desember 2021 mencapai Rp 496.430.221 (98,06%) diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rapat dalam kantor (belanja jamuan), perjalanan dinas menghadiri rapat diluar kota, dan penyelenggaraan *Focus Group Discussion*. Kondisi pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi kerja di Asdep

KP/KPH, dimana penyelenggaraan rapat tatap muka diminimalisir dan memaksimalkan rapat melalui daring (*online*).

#### D. IKHTISAR IKU

Selain menetapkan Rencana Kinerja dan PK, instansi pemerintah juga menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**

menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut sasaran strategis dan IKU Asdep KPH.

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Uraian IKU</b>
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<p>a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: small;"> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%</math></p> </div> <p>Disetujui berarti:                      Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li> <li>+ menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li> </ul> <p>b. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan</p>

Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet  $\times 100\%$

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga

2. Terwujudnya hasil pengendalian a. penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi

Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)  $\times 100\%$

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:

✚ mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

✚ menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

- b. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh **Sekretaris Kabinet**

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%

Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:

- ✚ mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- ✚ menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

## **BAB 3**

### **AKUNTABILITAS KINERJA 2021**

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kategori Pencapaian Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Rentang Capaian Kinerja</b>	<b>Kategori Capaian Kinerja</b>
<b>1</b>	90%- 100%	Sangat Memuaskan
<b>2</b>	85 % - 90 %	Memuaskan
<b>3</b>	70% - < 85%	Baik
<b>4</b>	55% - < 70%	Sedang
<b>5</b>	< 55%	Kurang Baik

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna memperbaiki pelayanan publik (*improved public service*) dan akuntabilitas (*improved accountability*). Kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (*performance data*) berupa capaian kinerja (*performance result*) yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa hasil (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator-indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal apakah suatu kegiatan atau sasaran telah berhasil dicapai sesuai rencana sebelumnya atau sebaliknya. Indikator Kinerja berupa *output* maupun *outcome* telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Indikator *output* merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan.
- Indikator *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penjelasan secara rinci terhadap pencapaian masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA <sup>[A1]</sup>

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/ arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh Asisten Deputi KPH dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Asdep KPH memiliki dua sasaran strategis, dengan 4 indikator kinerja, yang didetailkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**

#### **Perbandingan Capaian Asdep KPH Triwulan 4 Tahun 2020 dan Tahun 2021**

No	Uraian	Outcome	
		2020	2021
	<b>Sasaran Strategis “Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kelautan dan Perikanan”</b>		
1	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	92%
2	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%
	<b>Sasaran Strategis “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi”</b>		
1	Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	80%
2	Rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%

**Tabel 3.3**  
**Pemanfaatan Output Asdep KPH 2021**

No	Uraian	Rekomendasi yang disetujui Sekretaris Kabinet
[A2]	<b>Sasaran Strategis “Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kelautan dan Perikanan”</b>	
1	Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	12
2	Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	13
	<b>Sasaran Strategis “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi”</b>	
3	Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4
4	Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	6
	<b>Total</b>	<b>35</b>

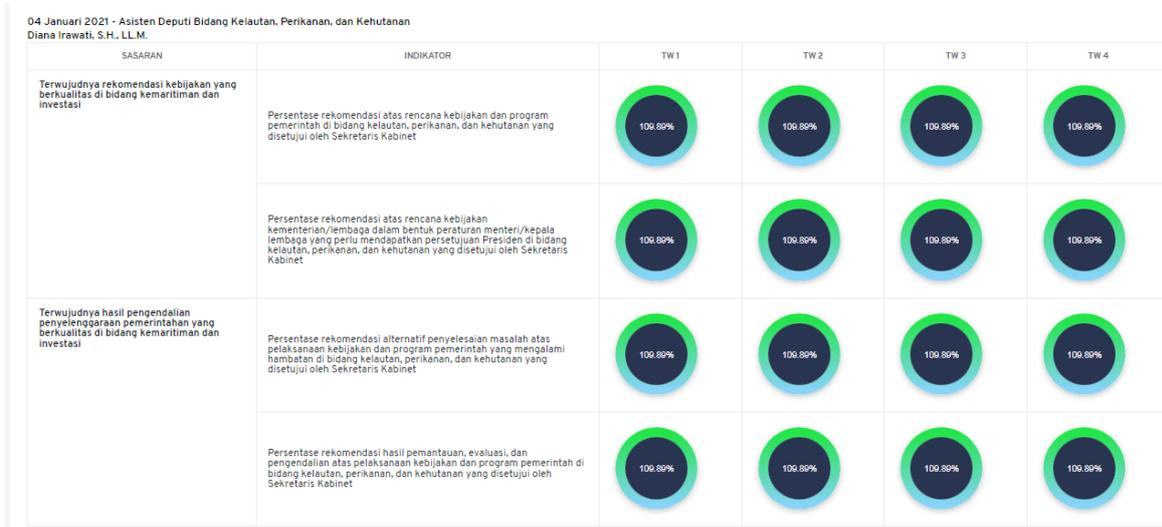
**Tabel 3.4**  
**Capaian Outcome 2021**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	92%	101.43%
	Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	100%	109.89%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	91%	80%	87.91%
	Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	100%	109.89%

[A3]

### Gambar 3.1

## Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu dan Capaian Kinerja 2021



#### a. Pencapaian Kinerja pada Masing-Masing Sasaran Indikator Kinerja

Uraian capaian kinerja per sasaran oleh Asdep KPH tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

##### 1) Capaian Sasaran 1 Indikator 1

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Sasaran 1 Indikator 1**

[A4]

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja (Outcome)	% Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	92% 12 Rekomendasi	101.43%

Berdasarkan tabel diatas realisasi sasaran 1 indikator 1, mencapai 101.43% untuk untuk capaian *outcome*. Sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**. Adapun beberapa contoh proses yang dilakukan oleh Asdep KPH dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan tersebut, antara lain:

**Tabel 3.6**

**Contoh Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program  
Pemerintah di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui  
oleh Sekretaris Kabinet**

No	Isu	Substansi
1	Rencana Penataan Alur Sungai di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian LHK berencana melakukan normalisasi terhadap sungai pada zona khusus mitigasi dan rekonstruksi (Kali Putih, Gendol, dan Woro) secara terintegrasi, Namun belum terdapat pengaturan mengenai penggunaan alat berat dalam kegiatan normalisasi sungai (dalam rangka mitigasi bencana), sedangkan pengambilan material yang sudah mengeras tersebut tidak dapat dilakukan secara tradisional.</li> <li>2. Setkab merekomendasikan bahwa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan normalisasi sungai di TNGM merupakan urusan Pemerintah Pusat (KemenPUPR).</li> <li>b. Kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan di kawasan Taman Nasional, termasuk penggunaan alat berat untuk pertambangan dilarang di kawasan Taman Nasional.</li> </ol> </li> <li>3. Setkab telah menginisiasi beberapa kali rapat koordinasi dan kesepakatan rapat telah disampaikan kepada Menteri LHK dan Menteri PUPR melalui surat Seskab Nomor. B.288/Seskab/Marves/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021.</li> </ol>
2	Percepatan Penetapan Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2021 mengamanatkan dalam Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta salah satunya penetapan Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Skala 1:250.000 – 1:25.000, dengan target untuk seluruh wilayah Indonesia tersedia peta kerja indikatif (September 2021) dan integrasi (Desember 2021).</li> <li>2. Karena adanya keterbatasan sumber daya, sampai dengan Juni 2021, provinsi yang penetapan batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya lautnya sedang diupayakan, baru batas antara DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung,</li> </ol>

No	Isu	Substansi
		<p>sehingga perlu ditentukan provinsi yang diprioritaskan penetapan batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya lautnya.</p> <p>3. Setkab telah menginisiasi rapat koordinasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi untuk mengidentifikasi provinsi yang perlu diprioritaskan penetapan batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya lautnya berdasarkan kegiatan prioritas/strategis sektor (Kementerian/Lembaga). Kesepakatan rapat telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Marves Nomor. B.0313/MARVES/7/2021 tanggal 2 Juli 2021.</p> <p>4. Kesepakatan rapat di Setkab telah ditindaklanjuti oleh Kemendagri dengan penyelenggaraan rapat penyamaan persepsi garis pantai yang akan digunakan dalam penetapan batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi dan pembahasan batas wilayah laut dengan pemerintah provinsi.</p>
3	Rehabilitasi Lahan Kritis Mangrove	<p>1. Menteri LHK mengusulkan perubahan Perpres No. 20 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BGRM) untuk mengakomodir penambahan areal kerja dan lingkup kerja BGRM, dan penambahan anggaran kegiatan rehabilitasi mangrove tahun anggaran 2022.</p> <p>2. Menindaklanjuti usulan tersebut, Setkab menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan K/L terkait dan menyepakati, diantaranya rivi dan penataan anggaran pelaksanaan rehabilitasi mangrove, pemetaan dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi mangrove pada K/L terkait, dan pengkajian alternatif pembiayaan nonAPBN (surat Seskab No. B.341/Seskab/ Marves/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021).</p>
	Rencana Kunjungan Kerja Presiden	<p>1. Menteri LHK menyampaikan usulan rencana kunjungan kerja Presiden untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (termasuk mangrove), perhutanan sosial, konservasi, kayu rakyat, abrasi pantai, dan kegiatan lainnya dalam periode September s.d. Desember 2021 yang dapat dikombinasikan dengan rangkaian agenda kunjungan kerja Presiden terkait sektor kesehatan dan/atau infrastruktur.</p> <p>2. Dari kegiatan yang telah diusulkan Menteri LHK,</p>

No	Isu	Substansi
		<p>Setkab merekomendasikan 3 kegiatan yang dapat diprioritaskan Presiden, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan pembagian SK Perhutanan Sosial di Jayapura yang diintegrasikan dengan rangkaian agenda Presiden untuk pembukaan PON XX Papua 2021.</li> <li>b. Peninjauan Perhutanan Sosial di Lumajang.</li> <li>c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Persemaian, dan Perhutanan Sosial di Sumatera Utara yang diintegrasikan dengan agenda Presiden untuk meninjau perkembangan program Food Estate dan DPSP Toba.</li> </ol> <p>3. Usulan dimaksud telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Seskab Nomor M.788/Seskab/09/2021 tanggal 20 September 2021.</p>

## 2) Capaian Sasaran 1 Indikator 2

**Tabel 3.7**

**Perbandingan Capaian Sasaran 1 Indikator 2<sub>[A5]</sub>**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja (Outcome)	% Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	100% 13 rekomendasi	109.89%

Berdasarkan tabel diatas realisasi pada sasaran 1 indikator 2, rancangan rekomendasi sebesar 13 rekomendasi dengan tingkat capaian 109.89% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**.

Adapun beberapa contoh rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga

yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet yang diproses Asdep KP, antara lain:

**Tabel 3.8**

**Contoh Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapat Persetujuan Presiden di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

No	Isu	Substansi
1	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPermen mengatur program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2022 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Pemerintah Pusat untuk Dekonsentrasi dan kepada Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot) untuk Tugas Pembantuan. Selain itu, RPermen mengatur mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan, pemberian sanksi, penarikan dekonsentrasi, dan penghentian tugas pembantuan.</li> <li>2. Terhadap RPermen tersebut, Setkab merekomendasikan bahwa RPermen tersebut dapat diberikan persetujuan Presiden karena telah selaras dengan kebijakan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ol>
2	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPermen mengatur strategi, program, penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, pendanaan, dan pelaporan SKPT. RPermen mencabut PermenKP No. 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan SKPT di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.</li> <li>2. Terhadap RPermen tersebut, Setkab merekomendasikan bahwa RPermen tersebut dapat diberikan persetujuan Presiden karena secara substantif sudah tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

### 3) Capaian Sasaran 2 Indikator 1

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Sasaran 2 Indikator 1**<sup>[A6]</sup>

Indikator Sasaran	Target	Capaian Kinerja (Outcome)	% Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	80% 4 rekomendasi	87.91%

Realisasi pada sasaran 2 indikator 1 sebagaimana tabel di atas, yaitu adalah sebesar 4 rekomendasi dengan tingkat capaian 87.91% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **memuaskan**.

Adapun beberapa contoh proses yang dilakukan oleh Asdep KP dalam menghasilkan rancangan rekomendasi dimaksud, antara lain:

**Tabel 3.10**  
**Contoh Rekomendasi Alternatif Penyelesaian Masalah atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

No	Isu	Substansi
1	Perizinan Berusaha terkait Bangunan dan/atau Instalasi (Pipa dan/atau Kabel) di Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan guna <b>menambahkan</b> Perizinan Berusaha membangun, membongkar, dan memperpanjang pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di laut dalam Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li> <li>2. Mengingat isu dimaksud terkait dengan perizinan berusaha diluar sektor kelautan dan perikanan, Setkab menginisiasi rapat</li> </ol>

No	Isu	Substansi
		pembahasan lintas K/L pada 18 Juni 2021 dan merekomendasi kan pengalihan kewenangan terkait perizinan berusaha dimaksud dilaksanakan setelah dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait dan secara paralel mempersiapkan prasarana dan sarana yang diperlukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2	Permohonan Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Berau kepada Presiden terkait Bantuan Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Lahan Garapan Milik Masyarakat yang Digusur oleh PT Berau Coal	<p>Terhadap permasalahan tersebut, Asdep KPH menyampaikan rekomendasi penyelesaian permasalahan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa proses pemanfaatan lahan mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1967 sebagaimana telah dicabut dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>2. Pembayaran ganti untung dari PT. Berau Coal kepada masyarakat yang menguasai lahan garapan yang dipersengketakan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi penguasaan lahan (dapat dilakukan dengan melakukan <i>overlay</i> atau tumpang susun data dalam lingkup Kebijakan Satu Peta, dengan sumber awal data berasal dari hasil Inver PPTKH Kabupaten Berau).</li> <li>3. Pemberian Akses Legal kepada Masyarakat terdampak untuk memanfaatkan Kawasan Hutan (sebagai pengganti lahan yang dipersengketakan) dengan mekanisme Perhutanan Sosial (di dalam Kawasan IUPHHK-HTI yang dipersengketakan atau di Kawasan Hutan lain yang berbatasan).</li> </ol> <p>2. Gabungan atau kolaborasi dari pola penyelesaian nomor 3 dan 4.</p>
3	Penataan Perizinan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asdep KPH menyelenggarakan rapat koordinasi teknis pada 16 Desember 2021 untuk mengetahui perkembangan terhadap arahan Presiden tanggal 4 Juni 2021 mengenai Penataan Perizinan Pertambangan dan Perkebunan.</li> <li>2. Forum rapat menyepakati perlunya terobosan dalam rangka percepatan proses penataan perizinan perkebunan tanpa menunggu terintegrasinya IUP Perkebunan sawit dalam skala nasional, yaitu dengan menggunakan pendekatan basis data.</li> <li>3. Dalam rapat juga telah disepakati tahapan kegiatan, output, timeline, serta instansi penanggung jawab kegiatan untuk penataan perizinan perkebunan, yang akan dikoordinasikan Setkab bersama dengan Kemenko Perekonomian.</li> </ol>

#### 4) Capaian Sasaran 2 Indikator 2

**Tabel 3.11**

**Perbandingan Capaian Sasaran 2 Indikator 2<sup>[A7]</sup>**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja (Outcome)	% Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	100% 6 rekomendasi	109.89%

Realisasi pada sasaran 2 indikator 2 sebagaimana tabel di atas, yaitu adalah sebesar 5 rancangan dengan tingkat capaian 110% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**.

Adapun beberapa contoh rancangan rekomendasi dimaksud yang diproses Asdep KPH, antara lain:

**Tabel 3.12**

**Contoh Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

No	Isu	Substansi
1	Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada Presiden (dengan tembusan salah satunya kepada Sekretaris Kabinet) menyampaikan Laporan Pelaksanaan Inpres Penghentian Izin Baru.</li> <li>2. Berdasarkan laporan Menteri LHK tersebut, Asdep KPH menyampaikan rekomendasi terkait areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan penggunaan PIPPIB sebagai acuan penghentian pemberian izin.</li> </ol>

No	Isu	Substansi
	(Inpres Penghentian Izin Baru)	

### Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan LKj ini, mekanisme pengumpulan data diperoleh dari arsip tahun 2021 yang berada di Tata Usaha Asdep KPH dan di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik. Data yang tersedia diklasifikasikan berdasarkan 2 kelompok besar, yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, seperti kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep KPH. Dalam LKj ini menggunakan data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mencapai kinerja Asdep KPH telah didukung oleh pagu anggaran selama tahun 2021 sebesar Rp506.232.000 (setelah revisi), dengan rincian sebagai berikut:

### Realisasi Anggaran Tahun 2021

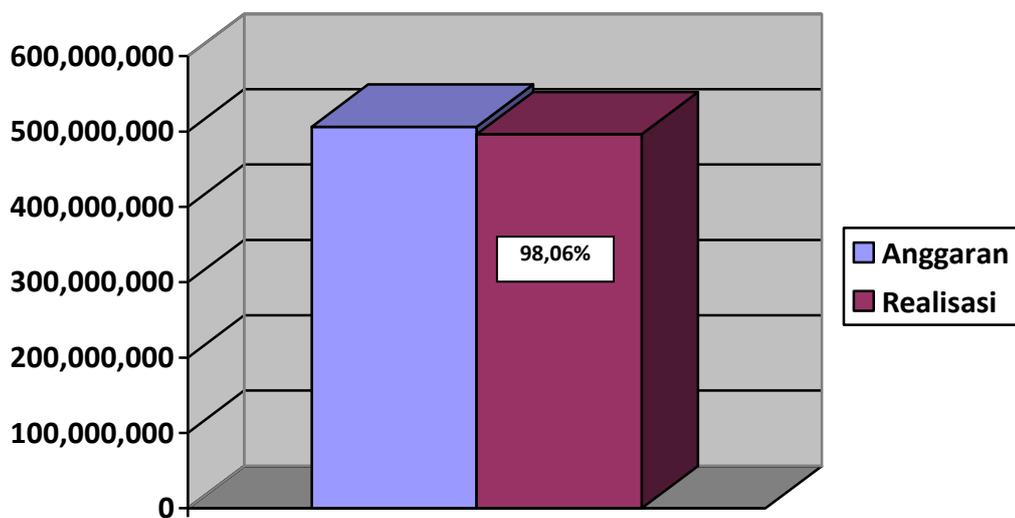
Dalam rangka menghasilkan rancangan rekomendasi yang berkualitas, Asdep KPH **merealisasikan anggaran berjumlah Rp496.430.221** dari total pagu Rp506.232.000 atau sebesar **98,06%**. Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, maka dapat diketahui bahwa untuk menghasilkan 37 output hasil analisis diperlukan rata-rata per **output adalah**.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa dalam mencapai Sasaran Strategis, Asdep KPH telah menghasilkan 37 rekomendasi dengan penggunaan dana terealisasi sebesar **Rp496.430.221** (98,06%). Artinya untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar **Rp13.417.033**, lebih rendah

dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp14.463.771 per output sehingga mampu **menghemat Rp1.046.738/output**. Anggaran digunakan untuk jenis alokasi perjalanan dinas, rapat koordinasi, dan penyelenggaraan Focus Group Discussion guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021**



**Tabel 3.13**  
**Akuntabilitas Keuangan**

% Capaian Output	Output	Uraian	Satuan	Target Output	Realisasi Output
Rata-rata	Rekomendasi yang	Output	Rekomendasi	35	37
Capaian	Berkualitas di	Input	Rupiah	Rp506.232.000	Rp496.430.221
Output	Bidang Kelautan	Input	Rupiah	Rp14.463.771	Rp13.417.033
disetujui:	dan	rata-			
100%	Perikanan/Kelautan, Perikanan, dan	rata-			
		rata			
		per			

% Capaian Output	Output	Uraian	Satuan	Target Output	Realisasi Output
	Kehutanan	output			
1. Penghematan Dana = Rp9.801.779 2. Efisiensi = Rp13.417.033/output 3. Efektivitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)					

### C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asdep KPH, yang di dalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, antara 80% sampai dengan 100%, sehingga dikategorikan “**memuaskan**” dan “**sangat memuaskan**”.

Jika dibandingkan dengan periode Oktober-Desember tahun 2020, persentase capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan namun jumlah rekomendasi yang dihasilkan lebih tinggi. Pada periode triwulan IV tahun 2020, capaian kinerja sebesar 100% dengan jumlah outcome sebanyak 19 rekomendasi. Sedangkan di tahun 2021, capaian kinerja dalam rentang 80%-100% dengan jumlah outcome sebanyak 35 rekomendasi. Penurunan kualitas kinerja tersebut dikarenakan adanya beberapa rekomendasi yang disusun Asdep KPH mendapatkan arahan lain oleh Deputi Marves sehingga tidak diproses lebih lanjut. Selain itu, rekomendasi yang sebelumnya akan disampaikan melalui surat keluar Deputi ataupun Sekretaris Kabinet, telah disampaikan pada saat rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, sehingga rekomendasi tidak diproses lebih lanjut.

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh pegawai untuk mendukung kinerja Asdep KPH dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja para pegawai di lingkungan Asdep KPH pada pencapaian sasaran strategis, antara lain:

1. Peran dan posisi Asdep KPH dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada

instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.

2. Munculnya isu-isu penting bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Asdep KPH, arahan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, arahan Sekretaris Kabinet dan Presiden, maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.
3. Meningkatkan peran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet.

Meskipun Asdep KPH telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

#### **1. Pandemi Covid-19**

Kondisi Pandemi Covid-19 telah membatasi ruang gerak dan realisasi rencana program dan kegiatan Asdep KPH selama tahun 2020. Selain kendala dalam realisasi rencana kerja, perubahan kondisi kerja dengan sistem *Work from Home* (WFH) merupakan suatu situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sebagai upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 pada cluster perkantoran, Setkab telah menerapkan sistem kerja *Work from Home* dengan tetap mengutamakan produktivitas kerja setiap pejabat dan pegawai.

#### **2. Proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang dikarenakan data pada K/L mitra belum *terupdate* dan belum tersedianya basis data *online* sehingga kesulitan dalam menyediakan data terbaru, Hal tersebut berpengaruh juga pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu lebih lama. Indikasi lainnya ditunjukkan oleh realisasi penyerapan anggaran untuk rapat koordinasi dengan instansi lain (eksternal) masih belum optimal, yang disebabkan belum adanya kerangka kerja seperti SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman masih belum optimal.

#### **3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat substantif**

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi kendala pencapaian target sasaran diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan proaktif dengan *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan (kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dll.) guna memperlancar proses pengumpulan/pengolahan data, pemantauan, evaluasi, serta permohonan pertimbangan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang akan dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet/Presiden
- b. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Asdep KPH pada berbagai kegiatan pelatihan ataupun pendidikan yang diselenggarakan secara internal instansi maupun diluar instansi. Selain itu, berkoordinasi dengan Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk penambahan pegawai yang memenuhi kualifikasi di lingkungan Asdep KPH.
- c. Mengoordinasikan permasalahan kekurangan sarana/prasarana penunjang dengan Biro Umum Sekretariat Kabinet dan dengan Pusat Data dan Informasi untuk penyediaan sumber referensi dan bahan pustaka.

# **BAB 4**

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**<sup>[A8]</sup>

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asdep KPH telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Asdep KPH, LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2021 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asdep KP/KPH perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan dan kondisi pandemi global Covid-19, Asdep KP/KPH tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

### **B. REKOMENDASI**

Sebagai unit eselon II yang baru dibentuk pada tahun 2015, di tahun 2021 Asdep KPH telah berhasil memenuhi Sasaran Kinerja dengan penyerapan anggaran yang baik dan kuantitas outcome yang lebih tinggi jika dibandingkan triwulan IV tahun 2020. Untuk itu keberhasilan tersebut harus ditingkatkan dengan berupaya mengatasi berbagai kendala yang timbul melalui beberapa penyempurnaan, yaitu:

1. Pengembangan basis data yang terkoneksi sehingga data dan informasi yang dibutuhkan selalu *terupdate*, mudah, dan cepat diperoleh.

2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, pendidikan, workshop, FGD dan kegiatan lain yang sejenis.
3. Pengembangan sistem surat elektronik (SIPT Setkab) yang terintegrasi dan disesuaikan dengan alur kerja di kedeputian substansi.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki dan peningkatan fasilitas perkantoran.
5. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam mendorong peningkatan produktivitas kerja dalam kondisi Pandemi Covid-19.

=====



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Irawati, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan,  
dan Kehutanan

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Diana Irawati, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

**Kegiatan**

**Anggaran**

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan | Rp544.029.000,- |
|---|-----------------|

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan | Rp255.971.000,- |
|---|-----------------|

Total Anggaran	Rp800.000.000,-
----------------	-----------------

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan,  
dan Kehutanan

  
Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

  
Diana Irawati, S.H., LL.M.

Lampiran 2

Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Alokasi Anggaran (Januari-Desember 2020)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu Anggaran (setelah revisi)	Realisasi Anggaran	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investas	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	92%	101.43	Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA)	341.658.000	335.280.917	98,13
	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	100%	109.89%				
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Rancangan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	91%	80%	87.91		164.574.000	161.149.304	97,91
	Rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	100%	109.89				
<b>TOTAL</b>		<b>91%</b>	<b>93%</b>	<b>102,28</b>		<b>341.658.000</b>	<b>335.280.917</b>	<b>98,13</b>

### Lampiran 3

#### Matriks Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2021

Program	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden					
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi</li> <li>2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi</li> </ol>					
Sasaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi</li> <li>2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi</li> </ol>					
Program/Kegiatan	Kinerja			Alokasi Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 %	92%	101.43%	341.658.000	335.280.917	98,13%
Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 %	100%	109.89%			

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 %	80%	87.91%	164.574.000	161.149.304	97,91%
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 %	100%	109.89%			
<b>TOTAL</b>	91%	93%	102.28%	341.658.000	335.280.917	98,13%

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

No		Pernyataan	Checklist	Halaman
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√	2-4
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√	1-31
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√	15-29
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√	Lampiran 1-4
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	30-31
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	25-27
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√	

Kepala Bidang Fasilitas Operasional  
Kedeputan Bidang Kemaritiman  
dan Investasi

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
SESUAI MEMORANDUM DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
NOMOR: M.513/ADM/11/2019 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT KABINET, ESELON I DAN ESELON II TAHUN 2019**

No	Pernyataan		Checklist	Halaman
1	BAB I	1. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	√	<b>7</b>
		2. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	√	
2	BAB III	1. Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2019	√	
		2. Analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi) . Contoh LKj Sekretariat Kabinet a. Template grafik perbandingan realisasi anggaran b. Tabel capaian kinerja dan anggaran	√	
3	Lampiran	Checklist FO sesuai edaran Depmin	√	

Kepala Bidang Fasilitas Operasional  
Kedeputian Bidang Kemaritiman  
dan Investasi